WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

WALIKOTA BENGKULU,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (7), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar; |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
|  |  | 5. | Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03). |
|   MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. |
|  |  | BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pasar di Kota.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pasar.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pasar.
7. Kepala UPTD Pasar adalah kepala unit pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pasar.
8. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, Los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan pedagang.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pelataran adalah lahan terbuka yang berada dalam lingkungan pasar dalam radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kali lima.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk memanjang tanpa di lengkapi dinding.
12. Kios adalah bangunan dengan luas tertentu di dalam pasar yang beratap dan dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding dimulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 |
|  |  | BAB IIKELAS PASARPasal 21. Pasar di Kota Bengkulu meliputi :
2. Pasar Panorama;
3. Pasar Minggu;
4. Pasar Barukoto;
5. Pasar Pagar Dewa; dan
6. Pasar Tanjung Gemilang.
7. Pasar Panorama, Pasar Minggu, Pasar Barukoto, dan Pasar Pagar Dewa ditetapkan sebagai Pasar Kelas II.
8. Pasar Tanjung Gemilang ditetapkan sebagai Pasar Kelas III.

BAB IIITATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSIPasal 31. Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
3. Penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
4. SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
5. Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51. Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
2. STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
3. STRD disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
4. STRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
5. Ketentuan mengenai bentuk dan isi STRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IVTATA CARA PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 61. Pembayaran Retribusi sewa kios dan los dibayar dimuka paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.
2. Pembayaran Retribusi sewa pelataran dilaksanakan setiap hari.
3. Pembayaran Retribusi terutang dilaksanakan sekaligus.

Pasal 71. Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi dapat melalui petugas yang ditunjuk atau langsung dibayar kepada Bendahara Penerima pada Dinas.
2. Hasil retribusi yang dibayarkan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerima pada hari yang sama.
3. Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
4. Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan SSRD Sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
5. Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 81. Bendahara Penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan blanko Bukti Setor.
2. Blanko Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
3. Lembar 1 : Bendahara Penerima;
4. Lembar 2 : Dinas Pendapatan Pengelolaan dan

 Asset Daerah;1. Lembar 3 : Kepala UPTD Pasar.
2. Lembar 4 : Kas Daerah;
3. Ketentuan mengenai bentuk dan isi Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 91. Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang.
2. Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :
	1. Wajib Retribusi mengalami Kerugian akibat kejadian Force Majeure;
	2. Wajib Retribusi tidak dapat menjalankan usahanya karena sakit atau mengalami musibah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan Keterangan Rukun Tetangga setempat.
	3. Los atau Kios yang ditempati direhab oleh Pemerintah Kota.
3. Wajib Retribusi yang mengalami kerugian harus dapat dibuktikan secara sah.
4. Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menetapkan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi atas pertimbangan Kepala UPTD Pasar.
6. Angsuran pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
7. Penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 101. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurangnya :
3. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
4. Lokasi yang ditempati
5. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
6. Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan analisa dan pertimbangan.
9. Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
10. Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
11. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIITATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSAPasal 111. Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
3. Kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi;
4. Hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
5. Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
6. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VIIITATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSIPasal 121. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
	* + - 1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD ;
				2. Kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
				3. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dapat diterima atau ditolak ;
				4. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Walikota untuk selanjutnya diterbitkan surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban dari Walikota, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IXPEMERIKSAANPasal 131. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi.
2. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
3. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
4. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan;

BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 14Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.Ditetapkan di Bengkulupada tanggal 2014WALIKOTA BENGKULU,H. HELMI HASAN |
| Diundangkan di Bengkulupada tanggal 2014SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,H. YADI |
| BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ……….. |

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

|  |
| --- |
| kota**PEMERINTAH KOTA BENGKULU****DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN****Jl. Hibrida XV Telp. (0736) 51160 Bengkulu** |
| Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jl. Hibrida Xv Telp. (0736) 51160 Bengkulu | SKRDSurat Ketetapan Retribusi Daerah | Nomor Urut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 |
| Nama Lengkap :Alamat Rumah :Jenis Petak :Jenis Dagangan :Kode Blok : |
| 1 | Ukuran Kios/Auning/Los |  |
| 2 | Harga kios/Auning/los | Rp. |
| 3 | Nilai Retribusi yang harus dibayarkan | Rp. |
| 4 | Denda 2 % / bulan |  |
| 5 | Tunggakan bulan |  |
| Jumlah ketetapan pokok yang harus dibayarkan | Rp. |
|  |
| CatatanSKRD ini berlaku apabila pembayaran retribusi pelayanan ini tidak ada tunggakan dan bila ada tunggakan paling lama 3 bulan harus lunas ditambah denda 2 %.Apabila selama 3 bulan belum juga dilunasi maka akan ditinjau kembali penyewa/pedagang mengajukan secara tertulis ke Dinas untuk menempati kios/auning/los tersebut. | Bengkulu,Kepala Dinas..................................... |
|  |
|  |  | WALIKOTA BENGKULUH. HELMI HASAN |

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kota | No:000000PEMERINTAH KOTA BENGKULUDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Tahun : 2014ParafPetugas : | kota | No:000000PEMERINTAH KOTA BENGKULUDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Tahun : 2014ParafPetugas : |
| Rp. 2000(dua ribu rupiah) |  |  | Rp. 2000(duaribu rupiah) |  |  |
| KARCIS HARIAN PELATARANPASAR KOTA BENGKULUBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULUNOMR 07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR | KARCIS HARIAN PELATARANPASAR KOTA BENGKULUBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULUNOMR 07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR |
|  | Karcis ini bukan merupakan bukti sewa dan kepemilikan tempat |  |  | Karcis ini bukan merupakan bukti sewa dan kepemilikan tempat |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | WALIKOTA BENGKULU, H. HELMI HASAN |

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

|  |  |
| --- | --- |
| PEMERINTAH KOTA BENGKULUDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Bulan :Tahun : |
| Nama | : | ......................................... | A: | Nomor : |
| Alamat | : | ......................................... |
| NPWPD | : | ......................................... |
| Menyetorkan berdasarkan Surat Setoran Retribusi Daerah Bulan .......... no.............. |
| No. | Ayat | Rincian | Jumlah (Rp) |
|  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Rp. |
| Dengan huruf : |
| ASLI | Penagih | Bengkulu, ..................Penyetor |
| LUNAS |
| Tanggal |
| Koord |
| Kepada Yth.Kepala Cabang Utama Bank Bengkulu/Kepala Kantor Pos dan Giro agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening kas daerah Pemerintah Kota Bengkulu | Ruang untuk tercap Kas Regsiter/Tanda Tangan/Cap/BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Giro |

DPD II-20

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KOTA BENGKULU****SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH****(SSRD)** |
| STS NO | : |  |  |  |  |  | Bank | : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. Rekening | : |  |
| Harap diterima uang sebesar Rp. .......................................................................................(Dengan huruf) (..........................................................................................................)..........................................................................................................)Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : |
| No | Kode Rekening | Uraian rincian objek | Jumlah (Rp) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Uang tersebut diterima pada tanggal ........................ |  |
|  |
| Mengetahui,:Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran...........................................NIP.Catatan : STS dilampiri SLIP Setoran Bank | Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu...........................................NIP. |

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KOTA BENGKULU****SURAT TANDA SETORAN****(STS)** |
| STS NO | : |  |  |  |  |  | Bank | : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. Rekening | : |  |
| Harap diterima uang sebesar Rp. .......................................................................................(Dengan huruf) (..........................................................................................................)..........................................................................................................)Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : |
| No | Kode Rekening | Uraian rincian objek | Jumlah (Rp) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Uang tersebut diterima pada tanggal ........................ |  |
|  |
| Mengetahui,:Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran...........................................NIP.Catatan : STS dilampiri SLIP Setoran Bank | Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu...........................................NIP. |

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN